



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM MENANGANI MASALAH KEMISKINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN GEBANG KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

Nama : M ALFALAH KHISBI

NIM : 182020100024



Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Indonesia pada Bulan maret 2020 menjadi salah satu permasalahan nasional yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Bahkan hingga sekarang ini pandemi Covid-19 masih memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk salah satunya yakni aspek ekonomi. Pandemi ini memaksa masyarakat mengalami perubahan pola kehidupan baik dalam konteks aktivitas atau kegiatan kerja, pendidikan, transportasi, dan bentuk aktivitas lain. Di samping itu, dalam setiap aktivitas tersebut, masyarakat perlu menerapkan pola kehidupan baru yang meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun/handsanitizer.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Presentase penduduk miskin pada bulan September tahun 2020 yakni 10,19%, meningkat apabila dibandingkan data pada bulan Maret 2020 yakni 9,78% dan data pada bulan September 2019 yakni 9,22%.

Tabel 1 Jumlah Peningkatan Penduduk Miskin di Indonesia

NO.	Bulan / Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	September 2019	23,66 juta orang
2	Maret 2020	26,42 juta orang
3	September 2020	27,55 juta orang

Sumber: BPS, 2021

Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah keluarga miskin. Oleh karena itu, pemerintah telah melaksanakan beberapa program terkait bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19 seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui Kementerian Sosial serta Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa melalui Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Dari beberapa program tersebut, BST merupakan program yang hadir dalam mendukung penanganan untuk keluarga miskin yang terdampak oleh Covid-19. Program BST merupakan program dari Kementerian Sosial berupa bantuan uang yang ditujukan kepada masyarakat atau keluarga miskin, tidak mampu, dan terdampak oleh pandemi Covid-19.

Data Empiris Pendukung Masalah

Permasalahan kemiskinan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. , berdasarkan data tersebut dapat juga diketahui bahwa Kabupaten Sidorajo menjadi salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari tahun 2019-2021. Kenaikan penduduk miskin tersebut dapat dikatakan merupakan dampak dari pandemi Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan layak mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah yang salah satunya yakni melalui Bantuan Sosial Tunai.

Tabel 1.3 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Per Kecamatan tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Jumlah Penerima Manfaat
Tanggulangi	78
Wonoayu	81
Prambon	105
Sukodono	105
Buduran	136
Gedangan	142
Sedati	149
Porong	171
Candi	193
Tulangan	238
Jabon	253
Balong Bendo	279
Krembung	293
Krian	301
Waru	315
Sidoarjo	339
Tarik	411
Taman	419
Total	4.008

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sidoarjo, 2021

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dijabarkan bahwa terdapat 3 kecamatan dengan jumlah masyarakat penerima manfaat yang tinggi, salah satunya yakni Kecamatan Sidoarjo yang merupakan ibu kota atau pusat kota dari Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan penjabaran pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Rincian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima Manfaat
1	Kel. Sekardangan	-
2	Kel. Bulusidokare	12
3	Kel. Sidoklumpuk	9
4	Kel. Gebang	8
5	Kel. Pucanganom	22
6	Kel. Magersari	31
7	Kel. Pucang	10
8	Kel. Sidokumpul	20
9	Kel. Urangagung	15
10	Kel. Sidokare	21
11	Kel. Celep	14
12	Kel. Lemahputro	11
13	Kel. Pekauman	8
14	Kel. Cemengkalang	19
15	Desa. Rangkah Kidul	10
16	Desa. Kemiri	13
17	Desa. Bluru Kidul	6
18	Desa Suko	17
19	Desa Lebo	11
20	Desa Cemengbakalan	5
21	Desa Sarirogo	22
22	Desa Jati	20
23	Desa Banjarbendo	26
24	Desa Sumput	9
Total		339

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, maka dapat diketahui bahwa Kelurahan Gebang menjadi salah satu kelurahan yang menerima program manfaat program bantuan social dari pemerintah yang cukup banyak. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo



Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi program BST dalam menangani permasalahan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa faktor kendala implementasi program BST dalam menangani permasalahan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Tujuan Penelitian:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program BST dalam menangani permasalahan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam implementasi program BST dalam menangani permasalahan kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat Penelitian:

➤ Manfaat Teoritis

- Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dalam konteks pengembangan ilmu administrasi publik khususnya pada konsep implementasi kebijakan.

➤ Manfaat Praktis

1. Bagi akademisi

Peneleitian ini memberikan manfaat bagi akademisi untuk menjadi acuan pada penelitian lain yang akan membahas tentang implementasi program Bantuan Sosial Tunai di daerah atau wilayah lainnya.

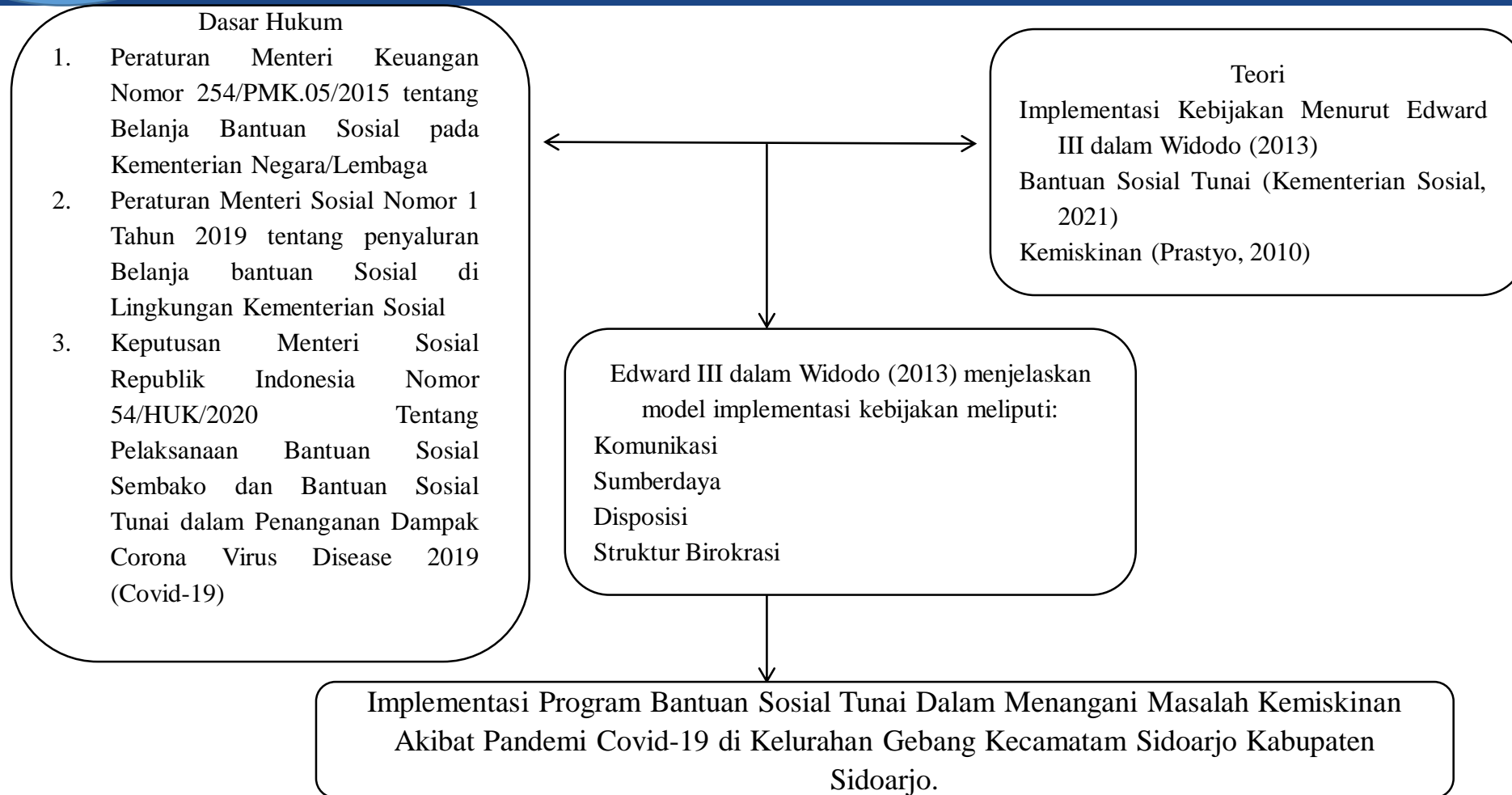
2. Bagi masyarakat

Peneleitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pemberian informasi mengenai implementasi program BST di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo

3. Bagi pemerintah.

penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai bahan masukan terkait implementasi program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Alur kerangka konseptual



(Sumber : Hasil Olah Penulis, (2022))

Permasalahan:

1. Masih tingginya jumlah penduduk yang mempunyai status kejeahatan sosial yang rendah berdasarkan DTKS dari Kementerian Sosial di Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu dilaksanakan kebijakan program BST
2. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo sebagai akibat dari pandemi Covid-19
3. Petugas pelaksana program kurang merespon arahan Kepala Kelurahan Pendataan dilakukan terlalu singkat

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran Belanja bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Teori

Implementasi Kebijakan Menurut Edward III dalam Widodo (2013)
Bantuan Sosial Tunai (Kementerian Sosial, 2021)
Kemiskinan (Prastyo, 2010)

Metode penelitian
deskriptif kualitatif

Teknik penentuan informan
purposive sampling

Teknik pengumpulan data
wawancara, observasi dan dokumentasi

Teknik penganalisisan data
pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan

Kesimpulan

1. Implementasi program Bantuan Sosial Tunai dalam menangani masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
2. Kendala Implementasi program Bantuan Sosial Tunai dalam menangani masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program BST untuk menangani masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Komunikasi

Aspek pertama yang menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang berupa komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan. bahwa pada kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi menunjukkan bahwa, aspek komunikasi imolementasi program BST telah menunjukkan 3 hal penting yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Hal ini dapat terwujud karena kelurahan secara telah menyampaikan informasi mengenai program BST tidak hanya kepada stakeholder tapi juga kepada penerima bantuan. Selain itu komunikasi juga dilakukan secara konsisten dan jelas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak kendala dalam pelaksnaan penyaluran BST.

Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya kebijakan yang tersedia. Sumber daya dalam dalam implementasi program BST di Kelurahan Gebang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sumber daya manusia meliputi seluruh perangkat Kelurahan Gebang termasuk Lurahnya dan beberapa stakeholder seperti Babbinsa, Babhinkamtibmas, Ketua RW/RT, Satlinmas dan tokoh masyarakat. Sementara dari sisi anggaran, Kelurahan Gebang hanya mengeluarkan anggaran untuk operasional pelaksanaan penyaluran BST. Fasilitas pendukung pelaksanaan penyaluran BST yakni balai Kelurahan Gebang sebagai lokasi penyaluran bantuan, masker, tempat mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan alat semprot disinfektan.

Disposisi

Disposisi merupakan aspek pendukung lainnya dalam implementasi kebijakan setelah aspek komunikasi dan sumber daya. Dalam implementasi program BST, Kelurahan Gebang sangat menunjukkan komitmen dan dukungan demi keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial ini. Karena dengan begitu, kelurahan dapat mendukung program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19. Di samping itu, adanya program BST di kelurahan Gebang ini mendapat respon positif bagi masyarakat penerima bantuan. Karena mereka sangat membutuhkan bantuan, sementara selama ini mereka belum mendapatkan bantuan sosial jenis lain dari pemerintah seperti melalui program PKH dan BPNT.

Gambar 4.1 Pelaksanaan Penyaluran BST di Kelurahan Gebang



Struktur Birokrasi

Sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam implementasi program BST menuntut adanya struktur birokrasi yang jelas. Implementasi program BST di Kelurahan Gebang telah menunjukkan struktur birokrasi melalui syarat-syarat dan proses penyaluran bantuan sebagai prosedur yang harus dilaksanakan oleh Kelurahan Gebang. Selain itu, dalam struktur birokrasi juga menunjukkan adanya fragmentasi, karena Kelurahan Gebang bertugas sebagai pelaksana teknis program BST. Hal ini karena BST merupakan program turunan dari Kementerian Sosial.

Kendala implementasi program BST dalam menangani masalah kemiskinan akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Keterbatasan jumlah penerima program disebabkan tidak semua calon penerima bantuan yang didata oleh kelurahan, pada akhirnya menerima bantuan BST. Dalam proses pendataan, Kelurahan Gebang mendata sekitar 200 masyarakat yang selanjutnya diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dan Kementerian Sosial. Namun hanya sekitar 105 masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan, karena tidak semua nama-nama yang diajukan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam penerimaan program BST.

Kendala kedua yakni adanya **kecemburuan** sosial antara penerima dan yang tidak menerima BST. Hal tersebut khususnya terjadi pada masyarakat yang telah terdata namun tidak menerima bantuan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan konflik di dalam masyarakat. selain itu, dapat juga memunculkan kecurigaan bahwa Kelurahan Gebang bertindak tidak adil dalam penentuan penerima program BST.

Kendala ketiga yakni **tidak berlanjutnya program BST di tahun 2022**. Kendala ini merupakan kendala yang paling penting, karena program BST yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan bagi masyarakat terdampak Covid-19. Program BST hanya berlaku selama 20 kali penyaluran yakni antara bulan Mei 2020 – Desember 2021. Program ini seharusnya berlanjut di tahun 2022, karena pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Gebang.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah diperoleh melalui proses wawancara di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi program BST untuk menangani masalah kemiskinan akibat pandemi Covid-19 di Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program BST di Kelurahan Gebang dilakukan dalam bentuk sosialisasi program dan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan program. Sosialisasi dilakukan secara langsung dan menggunakan media *WhatsApp*. Melalui sosialisasi diharapkan para perangkat kelurahan dan stakeholder kelurahan dapat memahami detail mengenai program BST. Sementara untuk sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mengenai teknis dan mekanisme pencairan BST.

Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi program BST di Kelurahan Gebang meliputi Sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sumber daya manusia meliputi seluruh perangkat Kelurahan Gebang termasuk Lurahnya dan beberapa stakeholder seperti Babhinsa, Babhinkamtibmas, Ketua RW/RT, Satlinmas dan tokoh masyarakat. Sementara dari sisi anggaran, Kelurahan Gebang hanya mengeluarkan anggaran untuk operasional pelaksanaan penyaluran BST. Fasilitas pendukung pelaksanaan penyaluran BST yakni balai Kelurahan Gebang sebagai lokasi penyaluran bantuan, masker, tempat mencuci tangan, *hand sanitizer*, dan alat semprot disinfektan.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi program BST di Kelurahan Gebang menunjukkan bahwa perangkat Kelurahan dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mendukung secara penuh pelaksanaan program BST, karena program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh masyarakat yang sangat bersyukur dengan adanya program ini sebagai bantuan untuk kebutuhan harian di saat pandemi covid-19.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi program BST melalui syarat-syarat ketentuan bagi penerima bantuan dan alur pelaksanaan program BST mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan BST melalui Kantor Pos. Secara umum program BST diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid dan belum memperoleh jenis bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT. Sementara dari segi mekanisme pelaksanaan, kelurahan hanya berperan dalam menyampaikan data calon penerima bantuan dan membantu pelaksanaan penyaluran. Hal ini karena program BST merupakan turunan dari Kementerian Sosial.

Saran

Berdasarkan kendala-kendala yang implementasi program BST Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Maka Kelurahan Gebang dan instansi perlu mempertimbangkan hal-hal berikut sehingga kedepannya implementasi program bantuan sosial sejenisnya dapat berjalan dengan lebih optimal:

- a. Melakukan pendataan ulang masyarakat kelurahan yang benar-benar miskin untuk disampaikan kepada Dinas Sosial sebagai pertimbangan pelaksanaan BST maupun bantuan sosial lain yang dilakukan di Kelurahan Gebang.
- b. Kelurahan Gebang perlu mengoptimalkan media layanan kelurahan untuk menampung masukan dan saran dari masyarakat. sehingga permasalahan yang terjadi masyarakat secara langsung dapat direspon oleh pihak kelurahan bukan menjadi isu yang beredar di masyarakat
- c. Melakukan edukasi kepada masyarakat, bahwa bantuan sosial bukanlah cara instan untuk keluar dari kemiskinan dan bantuan sosial bukanlah sesuatu yang akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.

Terima Kasih